

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026.

Penyusunan LKjIP ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kebumen ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Selain itu Laporan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2023 yang menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebumen, 25 Januari 2024



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Fungsi Strategis..	5
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	10
1. Rencana Strategis (Renstra).....	11
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Kinerja	
2.2 Perjanjian Kinerja	
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Realisasi Anggaran.....	18
BAB IV : PENUTUP	22
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	
4.2. Permasalahan/Kendala	
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja
Anggaran dan Realisasi Belanja

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen
Tabel 2.2	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu
Tabel 3.4	Tabel Kemajuan Sasaran Strategis
Tabel 3.5	Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi
Tabel 3.6	Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Tabel 3.7	Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Sumber Daya

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi dan Tatalaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	3
------------	--	---

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Jumlah pegawai menurut eselon/ jabatan	4
Diagram 1.2. Jumlah pegawai menurut golongan	4
Diagram 1.3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan	4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sejalan dengan perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah sebagai organisasi publik harus lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dalam Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Setiap SKPD diharapkan dapat membuat rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (*Performance Accountability Report*) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan menghasilkan kinerja organisasi berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 merupakan kewajiban sebagaimana

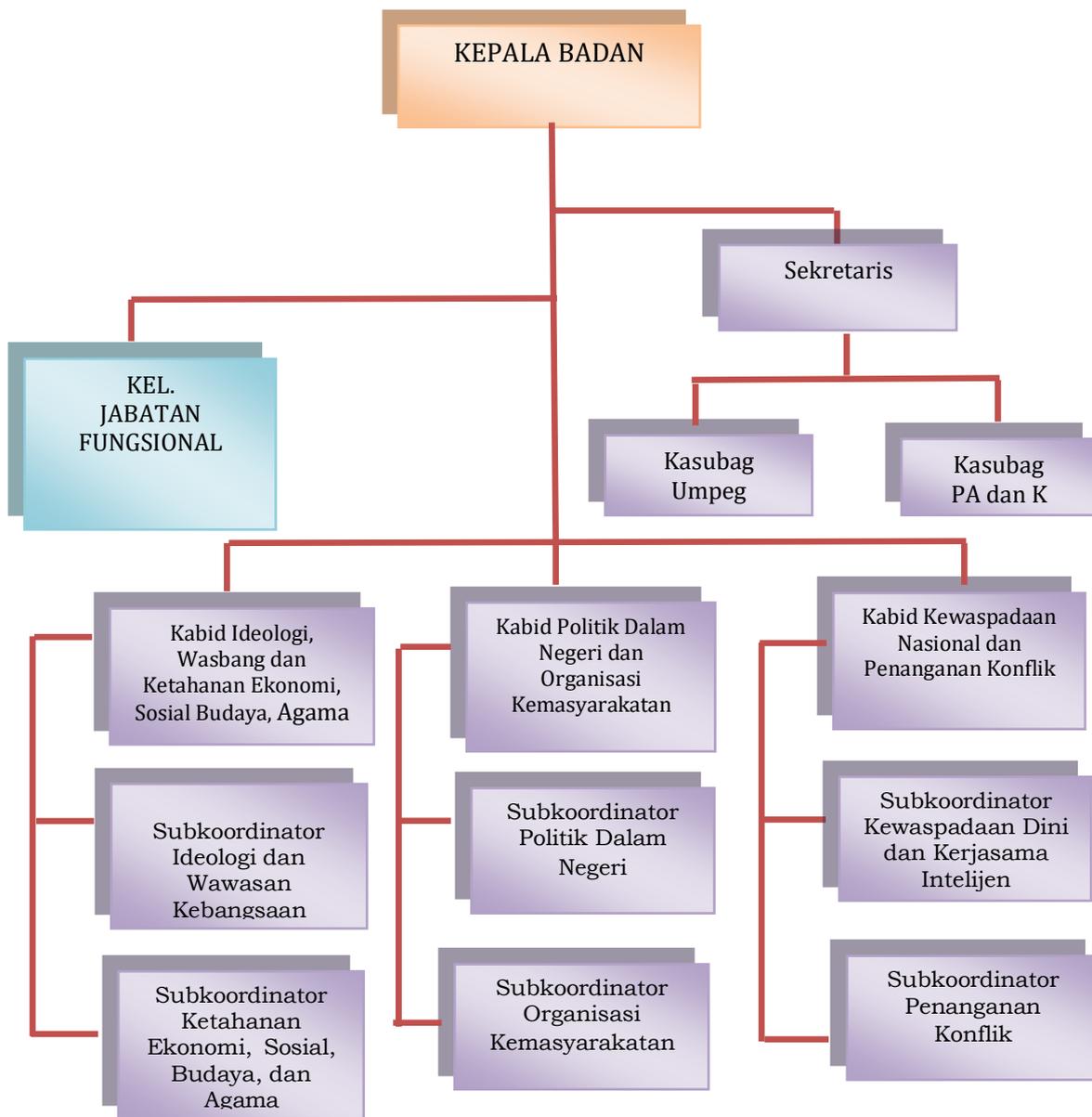
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance (GGG)*, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum. Selanjutnya diharapkan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun berikutnya dan dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Kebumen selanjutnya.

Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 yaitu terdiri dari Kepala Badan yang dibantu oleh satu orang Sekretaris membawahi 2 Kasubbag dan tiga Kepala Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi dan Tatalaksana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai berikut :



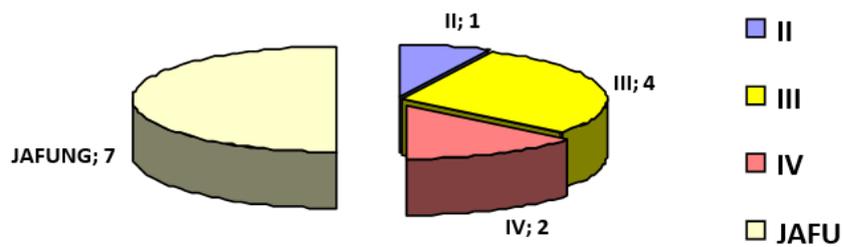
Adapun Jumlah sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan tupoksi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian struktural, fungsional maupun fungsional

umum berdasarkan jenis kepegawaian sebagaimana tercantum dalam diagram dibawah ini :

1. Struktural :

- a. Kepala Badan, eselon II.
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang, eselon III.
- c. Kepala Subbag, eselon IV.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Diagram 1.1.
Jumlah Pegawai Menurut Eselon / Jabatan

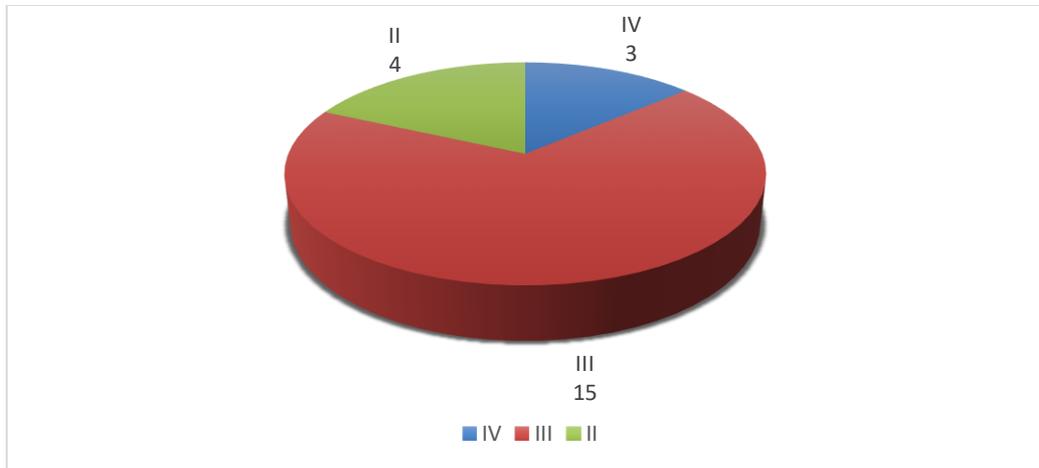


2. Keadaan Pegawai

a. Menurut Golongan

Berdasarkan golongan, pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat digambarkan dalam diagram di 1.2 berikut :

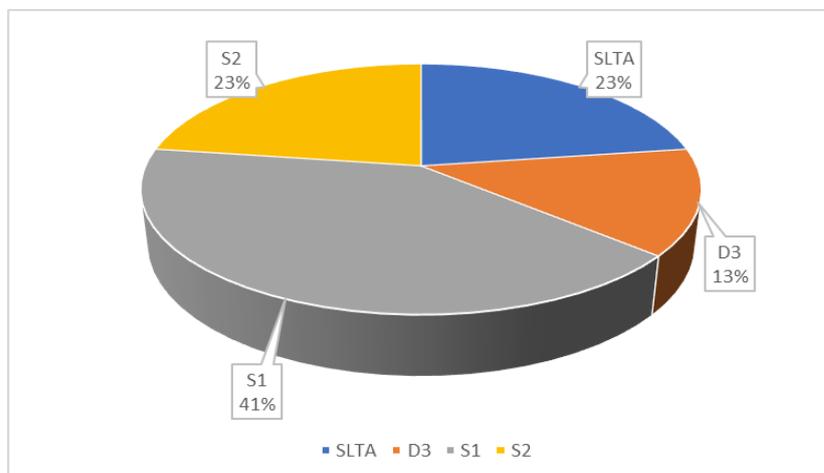
Diagram 1.2.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan



Dengan melihat komposisi pegawai pergolongan di atas dapat diketahui bahwa pegawai Bakesbangpol didominasi oleh Golongan III, kemudian golongan II dan IV. Dengan mempertimbangkan distribusi golongan pegawai dalam OPD Bakesbangpl, kebijakan gaji dan pengembangan karir dapat dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan memberikan peluang yang adil bagi semua pegawai.

b. Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

Diagram 1.3
Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan karyawan /karyawati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 masih di dominasi oleh lulusan S1 dan S2 hal ini tentunya memberikan dampak positif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Karena individu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas-tugas dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kerja.

1.2. Fungsi Strategis

Fungsi strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2020, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi ,pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitong, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Forum Pimpinan Daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
 - a. Munculnya paham-paham radikal atau ekstremisme yang mengancam keutuhan ideologi Pancasila karena adanya

pengaruh ideologi asing yang merongrong ideologi dan nilai-nilai nasional.

- b. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menurunnya toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
- d. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. Derasnya arus masuk budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

- a. Kurangnya minat dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kegiatan organisasi kemasyarakatan.
- b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah;
- c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;
- d. Kurangnya representasi perempuan dalam kegiatan politik dan organisasi kemasyarakatan.
- e. Adanya konflik antarorganisasi kemasyarakatan yang dapat merugikan stabilitas sosial.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

- a. Jumlah personel yang terbatas menghambat efektivitas operasional Kesbangpol dalam memonitor dan menanggapi potensi konflik.
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;

- c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
- e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah suatu proses perumusan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Dalam konteks organisasi perangkat daerah (OPD), perencanaan strategis memiliki peran penting dalam membimbing kebijakan dan program agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang.

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.
6. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menjalankan misi yang ke-5 yaitu Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Strategi yang ingin dicapai dalam pembangunan guna mewujudkan tujuan misi tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan partisipasi politik.
- b. Pemberdayaan Ormas.
- c. Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya.

- d. Meningkatkan kewaspadaan dini di daerah.

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan memberikan sosialisasi nilai-nilai pancasila dalam masyarakat yang multi kultur.
- b. Menumbuhkan kesadaran wawasan kebangsaan.
- c. Pembentukan jiwa patriotisme melalui program bela negara dan pendidikan wawasan kebangsaan.
- d. Penguatan ketahanan ekonomi.
- e. Penguatan fungsi FKUB dan FPBI/FPK.
- f. Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- g. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah melalui FKDM.
- i. Penguatan Tim Penanganan Konflik Sosial.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi

3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target indikator kinerja sasaran strategis adalah nilai atau tingkat pencapaian yang diinginkan untuk suatu indikator kinerja tertentu yang terkait dengan tujuan strategis suatu organisasi atau perangkat daerah. Sasaran strategis mengacu pada tujuan jangka panjang yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam konteks ini, target indikator kinerja sasaran strategis membantu mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan strategisnya.

Target indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan		Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	60,71	64,29	71,43	75	78,57	78,57
		Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	60,71	64,29	71,43	75	78,57	78,57

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja menjadi alat yang penting dalam memastikan keterlibatan dan tanggung jawab perangkat daerah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah secara keseluruhan. Selain itu, perjanjian kinerja juga berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	64,29	64,29	-	-	-	64,29
	Sasaran:								
2	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	64,29	64,29	-	-	-	64,29

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.443.169.000	3.591.242.581	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	415.000.000	415.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.066.125.000	25.692.385.000	APBD

4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	237.341.000	237.341.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.370.842.000	1.722.842.000	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.321.847.000	1.321.847.000,	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target sebelum perubahan	Target setelah perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	28%	29%	30%	13%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.443.169.000	3.591.242.581	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN, EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	41,64	41,64	17,84	23,86	32,68	-

2.	Meningkatkan Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Rasio elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	54,64	54,64	58,83	104,59	5,81	-
----	--	---	-------	-------	-------	--------	------	---

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN*
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 415.000.000	Rp 415.000.000	APBD
2.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 1.370.842.000	Rp 1.722.842.000	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Capaian Partisipasi Masyarakat/ Penduduk Dalam Proses Pemilihan Umum	67,59%	67,59%	-	-	-	67,59%
2.	Meningkatkan kapasitas pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan orang asing.	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	7%	91%	2%	-

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1.	Program Peningkatan Peran Serta Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.066.125.000	25.692.385.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.341.000	237.341.000	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	Persentase Penanganan Konflik Berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.	64,29	64,29	-	-	-	64,29

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	1.321.847.000	1.321.847.000	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	3	3	3	3
2	Terpenuhinya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	3	3	3	3
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	37	37		12	25	

		Pemerintah Daerah						
4	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	3	3	3	3
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54	54	8	38	8	
6	Meningkatnya kapasitas ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	22	22		22		

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.933.902.000	3.068.415.581	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000	25.900.000	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.939.000	113.939.000	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.835.000	160.835.000	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.352.000	96.912.000	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.396.000	109.396.000	APBD

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	7	7	4	1	1	1

No.	Kegiatan	Anggaran murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.845.000	15.845.000	APBD

**PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2330	3030	800	780	750	700
2	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat	orang	400		400		

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.370.842.000	1.722.842.000	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1	1			1	

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000	415.000.000	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	2.250	2.250	750	750	750	-

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.066.125.000	25.692.385.000	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	630	630	315	315	-	-

	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan ormas Asing di Daerah						
2	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	36	36	-	-	36	-

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.341.000	237.341.000	APBD

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	130	130	37	33	48	12

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik	1	1			1	

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
	1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	200.000.000	200.000.000	

	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah	12.847.000	12.847.000	

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4	4	1	1	1	1
2	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	5	5	1	2	1	1

	Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						
3	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130	130	50	30	50	
4	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5	5	1	2	1	1

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
1)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35.000.000	35.000.000	APBD
2)	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64.000.000	64.000.000	APBD

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
	3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	210.000.000	210.000.000	APBD
	4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	800.000.000	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kebumen sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam membentuk dan memelihara harmoni sosial, keutuhan bangsa, serta stabilitas politik di tingkat lokal. Dalam setiap langkahnya, Kesbangpol Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja suatu organisasi menjadi dasar utama dalam membangun akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, bab ini dirancang untuk memberikan gambaran holistik mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Adapun skala pengukuran untuk mengukur capaian kinerja sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen direpresentasikan oleh capaian indikator strategis organisasi.

A. Capaian Kinerja Sasaran

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah dengan indikator Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	64,29	100	155,54	Sangat baik	Aplikasi Semarak

1. Capaian Kinerja Tahun 2023.

Realisasi capaian indikator sasaran sampai dengan Desember Tahun 2023 sebesar 155,54%, hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran telah melampaui target yang telah ditetapkan atau dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target Tahun 2023 sebesar 64,29 % dengan realisasi 100%.

Dari hasil evaluasi capaian indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi tercapai 100%, dengan demikian capaian kinerja Sasaran telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran perlu melakukan komparasi dengan capaian tahun lalu. Adapun komparasi capaian kinerja tersebut sebagaimana Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3.

Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	2021			2022			2023		
		Target %	Realisasi %	Capaian%	Target %	Realisasi %	Capaian%	Target %	Realisasi %	Capaian%
1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	57,14	100	175	60,71	100	64,72	64,29	100	155,54

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja Tahun 2021 dengan indikator persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi sebesar 100% atau capaiannya sebesar 175% dari target 57,14%. Pada Tahun 2022 realisasi kinerjanya sebesar 100% atau capaiannya sebesar 164,72% dari target 60,71%. Pada Tahun 2023 realisasi kinerjanya sebesar 100% atau capaiannya sebesar 155,54% dari target 64,29%.

3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Dalam mengevaluasi kinerja hingga saat ini perlu dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra. Adapun komparasi capaian kinerja tersebut sebagaimana Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4

Tabel Kemajuan Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
			Target %	Realisasi %		
1	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	64,29	100	78,57	127,27%

Target akhir periode perencanaan Tahun 2026 yaitu 78,57%. Dari realisasi yang telah dicapai pada tahun 2023 sebesar

100%, menunjukkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Provinsi	% Capaian
1	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dengan indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah, maka telah tercapai 100%.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Dari evaluasi kinerja dapat diketahui faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
A	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	64,29 %	100%	155,54	Keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran Bakesbangpol didukung hal-hal sebagai berikut : 1. Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sehingga setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani. 2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini serta Pusat Komunikasi dan Informasi yang melibatkan berbagai unsur intelejen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini serta penanganan konflik 3. Sinergitas antar Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen	

b. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi sebagaimana tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
A	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100				

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Tidak Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	100	Tidak Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Tidak Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	Tidak Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Tidak Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Tidak Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Tidak Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Tidak Menunjang
2				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	181,03	Menunjang
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Menunjang
3				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Rasio elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan	410,63	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Ekonomi, Sosial, dan Budaya	wawasan kebangsaan		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100	Menunjang
4				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Capaian Partisipasi Masyarakat/ Penduduk Dalam Proses Pemilihan Umum	100	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	Menunjang
5				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan	100	Menunjang
6				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.	100	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa besar alokasi dan penyerapan anggaran yang dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Penyerapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran Rp. 32.980.657.581 dengan serapan anggaran sebesar Rp 32.683.328.476. Anggaran dan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 tertera pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kebumen Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.591.242.581	3.459.101.961	96,32
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.845.000	15.599.500	98,45
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.068.415.581	2.940.434.879	95,83
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000	25.561.700	98,69
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.939.000	113.511.105	99,62
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.835.000	160.311.000	99,67
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.912.000	94.617.986	97,63
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	109.396.000	109.065.791	99,70

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
	Pemerintahan Daerah			
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	415.000.000	410.838.741	99,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	415.000.000	410.838.741	99,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	25.692.385.000	25.562.296.650	99,49
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	25.692.385.000	25.562.296.650	99,49
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	237.341.000	236.958.200	99,84
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	237.341.000	236.958.200	99,84

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
	Kemasyarakatan			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.722.842.000	1.713.797.770	99,48
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.722.842.000	1.713.797.770	99,48
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.321.847.000	1.300.335.154	98,37
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.321.847.000	1.300.335.154	98,37

A. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Bakesbangpol, membutuhkan sumber daya diantaranya yaitu anggaran. Anggaran merupakan sumber daya yang penting dan terbatas, sehingga perlu dikelola dengan efisien. Efisiensi anggaran berarti menghasilkan output yang optimal dengan input yang minimal. Adapun analisis terhadap sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023, sebagaimana Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Sumber Daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	100	15.845.000.	15.599.500	98,45	1,57%
2	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	3.068.415.581	2.940.434.879	95,83	4357%
3	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	23 orang	23 orang	100	25.900.000	25.561.700	98,69	1,32%
4	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	113.939.000	113.511.105	99,62	0,38%
5	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 unit	37 unit	100	160.835.000	160.311.000	99,67	0,33%
6	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	100	96.912.000	94.617.986	97,63	2,42%
7	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51 unit	51 unit	100	109.396.000	109.065.791	99,70	0,30%
8	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	23 kegiatan	23 kegiatan	100	415.000.000	410.838.741	99,00	1,01%
9	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4 kegiatan	4 kegiatan	100	25.692.385.000	25.562.296.650	99,49	0,51%
10	Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan	150 orang	150 orang	100	237.341.000	236.958.200	99,84	0,16%

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
11	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 lokasi kegiatan	64 lokasi kegiatan	1.280	1.722.842.000	1.713.797.770	99,48	0,53%
12	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 dokumen	5 dokumen	100	1.321.847.000	1.300.335.154	98,37	1,65%

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Tujuan penyusunan laporan LKJIP adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Laporan LKJIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menguraikan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan misi organisasi. Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yaitu :
Terwujudnya kewaspadaan dini daerah dengan indikator Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi terealisasi 100% dari target 64,29%.
2. Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dari pagu Rp 32.980.657.581 terealisasi Rp 32.683.328.476 atau 99,10%.

4.2 Permasalahan/Kendala

Dalam mencapai target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi. Permasalahan dan kendala tersebut diantaranya :

1. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik sumber manusia serta sarana dan prasarana.
2. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang luas, tentunya menjadi kendala dalam pengawasan dan penanganan apabila terjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, sedangkan jejaring komunikasi dan intelejen belum berjalan maksimal sampai di tingkat desa.
3. Globalisasi informasi saat yang semakin berkembang disamping membawa kemajuan bagi masyarakat, namun memiliki dampak negatif seperti nilai-nilai luhur budaya bangsa semakin luntur di masyarakat, berita hoax yang dapat mengancam disintegritas bangsa.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang perlu adanya strategi yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Analisis kinerja.

Melaksanakan analisis kinerja saat ini dengan melakukan analisis terhadap proses dan pencapaian kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

2. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia).

Dengan keterbatasan jumlah pegawai saat ini, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan kerja pegawai.

3. Penerapan Teknologi Informasi.

Memfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

4. Kolaborasi antarunit.

Meningkatkan koordinasi antar bidang dan sekretariat dalam mencapai tujuan organisasi.

5. Penghargaan dan pengakuan.

Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat memacu kinerja organisasi untuk lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kebumen, 25 Januari 2024

